



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 09																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

BPK Kritisi Sembilan Pemda

■ Laporan JKN Pontianak Belum Standar

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menyerahkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) belanja daerah kepada sembilan entitas kabupaten/kota se-Kalbar di ruang pimpinan lantai dua Kantor BPK Kalbar, Pontianak, Rabu (21/12). Sembilan pemerintah daerah itu yakni, Pemprov Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Sekadau, Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Singkawang, dan Sintang.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar Ida Sundari mengatakan area, tujuan, dan hasil pemeriksaan kinerja dilakukan pada enam entitas. "Pertama pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Kota Pontianak



hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat beberapa temuan yang termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara

Ida Sundari

Kepala BPK Perwakilan Kalbar

dan Kabupaten Sambas tahun 2015 dan semester satu tahun 2016," kata Ida dalam paparannya.

Menurut Ida, hasil pemeriksaan kinerja atas pe-

nyelenggaraan JKN bahwa masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar sesuai standar dan lebih memadai pada aspek penyelenggaraan program JKN.

"Kedua pemeriksaan kinerja atas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 semester satu pada Pemprov Kalbar, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi," ujarnya.

Menurut Ketua BPK ini, hasil dari pemeriksaannya menyimpulkan masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar sesuai standard dan lebih memadai serta berkualitas.

"Kemudian yang ketiga pemeriksaan kinerja atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan/Hinder Ordonantie (HO) tahun anggaran 2015 dan 2016 semester satu pada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Ketapang dan instansi terkait lainnya," beber Ida.

Lanjutnya, hasil pemeriksaannya masih sama dengan sebelumnya yaitu masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar sesuai standar, memadai serta efektif.

"Untuk PDTT atas belanja daerah yang telah dilaksanakan pada semester dua 2016 ini, pada tiga entitas yaitu

Perbaiki Kinerja

ASISTEN II Pemprov Kalbar Lensus Kandri mengapresiasi atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar kepada Pemprov dan kabupaten/kota se-Kalbar.

"Tentunya diharapkan semua jajaran pemerintah kabupaten/kota segera untuk menyerahkan ke satuan kerja perangkat daerah dan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di semester kedua tahun 2016," ujarnya.

Lensus Kandri berharap

dengan adanya LHP ini akan memperbaiki kinerja Pemprov Kalbar, maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Misalnya yang mendapatkan opini WTP dari sekian, nanti bisa ditingkatkan lagi opininya. Kemudian bagi yang opini WTP-nya banyak catatan, catatan itu sudah tidak ada lagi ini adalah unsur pembinaan untuk perbaikan kinerja di masing-masing pemerintah," ujarnya

Menurut Lensus, tidak ada

Subba
Badan



BPK Kritisi Sembilan Pemda

Sambungan Hal.9

Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sintang," ujarnya.

Secara umum, menurut Ida hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat beberapa temuan yang termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara atau daerah dan potensi kerugian keuangan negara atau daerah.

"Hasil pemeriksaan semester dua tahun 2016 ini akan mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan

pemerintah daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan, untuk itu diharapkan agar temuan tersebut dapat segera ditindak lanjut," tegas Ida.

Terkait hasil pemeriksaan JKN Kota Pontianak, Ketua DPRD Satarudin menanggapi. Dikatakannya, dengan temuan hasil pemeriksaan khususnya Kota Pontianak mengenai penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN)

akan segera ditindak lanjut.

"Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, kami juga akan berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan BPK. Sesuai dengan peraturan BPK biasanya maksimal 60 hari," ujarnya.

Satarudin berharap jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini, agar sesuai dengan standar yang meliputi jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam pemberlaan pelayanan kesehatan dan hal lainnya. (mg2)

Perbaiki Kinerja

Sambungan Hal.9

alasan Pemprov dan kabupaten/Kota untuk tidak menindaklanjuti.

"Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, mungkin disitulah untuk berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Kal-

bar," katanya.

Lensus menegaskan ini juga mengatakan akan melakukan pengawasan bagaimana tindak lanjut LHP masing-masing daerah, dalam satu tahun minimal dua kali.

"Kami tidak ingin hanya tingkat provinsi yang bagus, tapi semua tingkat kabupaten/kota juga harus bagus, karena juga akan memperbaiki kinerja pemerintahan Kalbar," tegasnya. (mg2)